

**PENGARUH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2010-2019**

Muhammad Iqbal

e-mail : Balliq85@gmail.com

Iseu Anggraeni

e-mail : Ise.maheza@gmail.com

Cantika Dewi

e-mail : Chantikadw23@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung tahun 2010-2019.

Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara Parsial Penerimaan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di mana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Diketahui juga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pangeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ini dibuktikan dengan hasil uji t di mana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Dan hasil uji F menunjukkan hasil F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . berdasarkan hasil tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara penerimaan Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2010-2019.

Kata kunci : Penerimaan Retribusi Daerah, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Maka dari itu di undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam memobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembuatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah sebagai salah satu media penggerak program pemerintah.

Menurut undang-undang nomor 33 tentang perimbangan keuangan tahun 2004 Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

**Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan
Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Periode 2010-2019|
Muhammad Iqbal, Iseu Anggraeni, Cantika Dewi**

potensinya. Nehen (2010:282) Otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan serta meningkatkan perekonomian yang nantinya dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di setiap daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan dan kepastian tersedianya pembiayaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, seperti hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Kewenangan pemerintah daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat mendorong munculnya aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah yaitu adalah retribusi daerah. Karena menurut Putra Windhu (2018:185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.

Selain retribusi daerah, pengeluaran pemerintah juga akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD merupakan keluaran (output) dari pengalokasian sumber daya pendapatan, idealnya di dalam anggaran tercermin kebutuhan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam bidang belanja modal akan dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan daerah dalam proses pembangunan, dan sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena menurut Darise (2008:141) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai yang bermanfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi retribusi daerah kabupaten Bandung selama 10 tahun mengalami ketidakstabilan dan ada beberapa tahun yang belum memenuhi target, Berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris BKAD Kabupaten Bandung hal tersebut dikarenakan tidak menentukannya pemakai fasilitas daerah di setiap tahunnya. Dan untuk realisasi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten Bandung selama 10 tahun mengalami kenaikan di setiap tahunnya, tetapi tidak ada yang memenuhi target. hal tersebut dikarenakan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah menganggarkan harga sesuai dengan standar harga, dan pada saat terjadi realisasi ada hasil penawaran, jadi harganya di bawah dari harga anggaran. Sedangkan untuk realisasi dari pendapatan asli daerah selama 10 tahun mengalami kenaikan di setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara hal tersebut terjadi karena kenaikan pada pendapatan pajak daerah dengan pemenuhan sebesar 123%, dan lain-lain PAD yang sah salah satunya dari penjualan aset. Berdasarkan hal di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung periode 2010-2019"

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian pustaka

2.1.1 Pengertian Retribusi Daerah

Yoyo (2017:108) mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Marihot, (2016:161) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.2 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Menurut Harry A.P (2013:40) Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2013:24) Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang sifatnya habis dipakai dalam proses produksi setelah dikurangi dengan penjumlahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dipisahkan dari kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut PP No. 58 tahun 2005 Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan belanja secara adil dan merata, agar kebutuhan setiap masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh agar tercipta pelayanan publik yang maksimal.

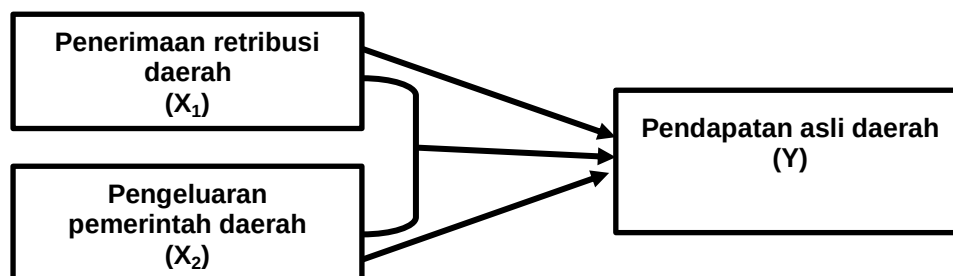
2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2007. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Rudy Badrudin (2011:99) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sugiono (2015:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dapat digambarkan dengan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 1
Bagan paradigma penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Penerimaan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2010-2019
2. Pengeluaran Pemerintah Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2010-2019
3. Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2010-2019

III. OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sugiono(2012:13) mengemukakan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Menurut Suharsimi (2010:29) objek penelitian atau variabel penelitian yaitu suatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut adalah Penerimaan Retribusi Daerah (X_1), Pengeluaran Pemerintah Daerah (X_2), Pendapatan Asli Daerah (Y).

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiono (2015:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian survei dengan tingkat eksplanasi adalah deskriptif penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan mengamati laporan keuangan sebagai alat pengumpulan data. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif pada akhir penelitian.

3.2.1 Populasi Dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Menurut Sugiono(2015:61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yaitu Laporan Keuangan Tahunan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

3.2.1.2 Sampel

Sugiono (2015:62) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan purposive sampling.

Alasan menggunakan sampel purposive sampling adalah karena tidak semua populasi yaitu laporan keuangan tahunan sejak berdirinya instansi sampai dengan

sekarang dijadikan sampel. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- Data yang berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan 2019 mengenai Penerimaan Retribusi Daerah, Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang di ambil dari laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung
- Data yang diperoleh sudah diaudit.

3.2.2 Metode Analisis Metode

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa : “Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah. Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 1
Koefisien Korelasi Dan Taksirannya

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2011:231)

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Ghazali (2016:98)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64) mendefinisikan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

a. Uji t (Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Setelah menghitung nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
- Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. Uji F (Simultan)

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
- Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

c. Menentukan Taraf Signifikansi

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2
Hasil uji regresi linear berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	47,170	440,027		,107	,918
Penerimaan Retribusi	-5,911	6,327	-,204	-,934	,381
Pengeluaran Pemerintah	,216	,062	,766	3,506	,010

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS Versi 20

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 47,170 - 5,911 X_1 + 0.216 X_2$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 47,170

Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau Penerimaan retribusi daerah (X_1) dan Pengeluaran pemerintah daerah (X_2) nilainya 0, maka Pendapatan asli daerah (PAD) (Y) adalah 47,170

b. Koefisien regresi Penerimaan Retribusi Daerah (X_1) sebesar -5,911

Koefisien regresi (b_1) tersebut hasilnya negatif Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang tidak searah, artinya jika nilai variabel Penerimaan Retribusi Daerah (X_1) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan penurunan Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -5,911 dengan asumsi variabel lain tetap.

c. Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah Daerah (X_2) sebesar 0,216.

Koefisien regresi (b_2) tersebut hasilnya Positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (X_2) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,216 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.1.2 Analisis Korelasi

Tabel 3
Hasil uji korelasi pearson product moment
Correlations

		Penerimaan Retribusi	Pengeluaran Pemerintah	PAD
Penerimaan Retribusi	Pearson Correlation	1	-,790**	-,809**
	Sig. (2-tailed)		,007	,005
	N	10	10	10
Pengeluaran Pemerintah	Pearson Correlation	-,790**	1	,927**
	Sig. (2-tailed)	,007		,000
	N	10	10	10
PAD	Pearson Correlation	-,809**	,927**	1
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	
	N	10	10	10

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS versi 20

Dilihat dari tabel perhitungan korelasi di atas, menunjukkan bahwa :

- Korelasi antara Penerimaan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar -0,809. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,00-0,199 mempunyai hubungan yang sangat rendah. Karena hasilnya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut tidak searah.
- Korelasi antara Pengeluaran Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,927. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, bahwa hubungan kedua variabel tersebut searah yang artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah daerah akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan asli daerah .

4.1.3 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)

1. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4
Hasil uji t pengaruh secara parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	47,170	440,027		,107	,918
Penerimaan Retribusi	-5,911	6,327	-,204	-,934	,381
Pengeluaran Pemerintah	,216	,062	,766	3,506	,010

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Versi 20

- Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Penerimaan Retribusi Daerah (X_1) adalah sebesar -0,934 dengan signifikansi 0,381 sedangkan t_{tabel} dengan dk 10 ($n-3 = 10-3$) adalah 2,365 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan di atas terlihat jika t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($-0,934 < 2,365$) dan taraf signifikansi X_1 (0,381) lebih besar daripada 0,05 maka H_0 diterima, yang berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah.
- Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel bebas pengeluaran pemerintah daerah (X_2) adalah sebesar 0,506 dengan signifikansi 0,010 sedangkan t_{tabel} dengan dk 10 ($n-3 = 10-3$) adalah 2,365 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan di atas terlihat jika t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($3,506 > 2,365$) dan taraf signifikansi X_1 (0,010) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan asli daerah.

2. Uji F (Simultan)

Tabel 5
Hasil uji F pengaruh secara simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	964695,484	2	482347,742	24,428	,001 ^b
Residual	138221,011	7	19745,859		
Total	1102916,495	9			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Retribusi

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 24,428 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 7 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,001 sehingga diperoleh Ftabel sebesar 4,74. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari tabel ANOVAa di atas dapat dilihat nilai signifikansi uji F

**Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan
Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Periode 2010-2019|
Muhammad Iqbal, Iseu Anggraeni, Cantika Dewi**

sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 Artinya kedua variabel dependen yang terdiri dari Penerimaan retribusi daerah (X_1) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) (Y).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2019

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa retribusi daerah dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar -5,911 dengan asumsi variabel tetap (konstan). Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar -0.333 berada pada nilai korelasi antara 0,00-0,199 mempunyai hubungan yang sangat rendah, karena nilainya negatif maka kenaikan retribusi daerah akan diikuti oleh penurunan pendapatan asli daerah dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah badan keuangan dan aset daerah kabupaten Bandung sebesar 16.5% memiliki pengaruh yang sangat rendah. Hasil uji t bahwa retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,934 < 2,365$), serta nilai sig di atas 0,005 yaitu sebesar 0,381 pada gambar kurva uji dua pihak berada pada penerimaan H_0 maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa penerimaan retribusi daerah (X_1) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y).

Penerimaan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, seperti terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) badan keuangan dan aset daerah kabupaten Bandung ketika penerimaan retribusi daerah mengalami ketidakstabilan, pendapatan asli daerah justru mengalami kenaikan, hal tersebut terjadi karena pendapatan asli daerah bukan hanya dari retribusi daerah saja tetapi ada juga dari pajak-pajak yang lain dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2019

Berdasarkan hasil verifikatif, bahwa pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,216 dan hasilnya positif, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika pengeluaran pemerintah naik maka pendapatan asli daerah juga naik dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian hasil koefisien korelasi parsial 0.798 berada pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat, karena nilainya positif maka setiap kenaikan pengeluaran pemerintah akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial pengeluaran pemerintah daerah kabupaten Bandung sebesar 87,5% memiliki pengaruh yang kuat. Hasil uji t bahwa pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,506 > 2,365$) dengan nilai sig kurang 0,05 yaitu 0,010 pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi bahwa pengeluaran pemerintah daerah (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y).

Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah (PAD), seperti terlihat di realisasi laporan keuangan (LRA) bahwa ketika pengeluaran pemerintah naik maka pendapatan asli daerah juga cenderung naik, hal ini didukung oleh teori ahli yang dikemukakan oleh Abimanyu (2005:40) yang

menyatakan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

3. Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2019

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel penerimaan retribusi daerah dan pengeluaran pemerintah secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien sebesar 0,935 berada pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif. Kemudian hasil perhitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil 87.5% memiliki pengaruh yang sangat kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (ϵ) sebesar 12,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan penerimaan retribusi daerah dan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bandung karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($24,428 > 4,74$) dengan nilai sig, $0,001 < 0,005$ dan pada gambar kurva uji pihak kanan bahwa F_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa penerimaan retribusi daerah (X_1) dan pengeluaran pemerintah daerah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bandung (Y).

Pengaruh yang signifikan penerimaan retribusi daerah dan pengeluaran pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung, bahwa secara bersama-sama dipengaruhi oleh penerimaan retribusi daerah dan pengeluaran pemerintah daerah, sehingga penerimaan retribusi daerah dan pengeluaran pemerintah daerah memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pendapatan asli daerah (PAD) walaupun secara sendiri-sendiri menunjukkan hasil bahwa Penerimaan retribusi daerah berpengaruh negatif, sangat rendah dan tidak signifikan, dan Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif, sangat kuat dan signifikan. Artinya kedua variabel ini apabila bersama-sama akan memberikan kontribusi yang positif, sangat kuat dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis uji pengaruh parsial antara Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2010-2019 menunjukkan bahwa Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Hal tersebut terjadi karena pendapatan asli daerah bukan hanya dari pendapatan retribusi daerah saja tetapi juga dari pajak-pajak yang lain dan pendapatan daerah yang sah lainnya.
2. Variabel pengeluaran pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung periode 2010-2019 hal ini dibuktikan dengan hasil uji parsial variabel pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya belanja pembangunan dan sarana prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat.

**Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan
Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Periode 2010-2019|
Muhammad Iqbal, Iseu Anggraeni, Cantika Dewi**

3. Secara simultan, variabel bebas Penerimaan Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. 2005 Format anggran terpadu menghilangkan tumpang tindih. BAPEKKI Depkeu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudy. 2011. Ekonomi Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. jakarta : PT. Indeks.
- Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi. 2013 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. (tidak dipublikasikan)
- Nehen. 2010. Perekonomian Indonesia. Denpasar: Udayana University Press.
- P., Harry A. 2013. Pengaruh Pengeluarab Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Economia*, 9.1.
- Siahaan, Marihot. 2016. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Windhu, Putra. 2018. Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.